

## **ANALISA DAMPAK PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI BANTUAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN DI KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH**

<sup>1</sup> Rina Deswita, <sup>2</sup> Ria Ariany

<sup>1,2</sup> Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

Corresponding author: [desibundarizfa@gmail.com](mailto:desibundarizfa@gmail.com)

Kota Bukittinggi, 102010, Indonesia

### **Abstract**

*The purpose of this study was to analyze the strategy and impact of the implementation of community empowerment as well as the effect of social assistance on improving the welfare of poor families in Payakumbuh Selatan Sub-district, Payakumbuh City. Data collection was conducted through semi-structured interviews. Data analysis was carried out using triangulation techniques. The results of the study found that the Regional Apparatus has provided assistance in the form of productive economic business development facilities for the extreme poor and the poor in the data on the Acceleration of Targeting for Extreme Poverty Reduction (P3KE). In addition, the budget was also increased through fiscal incentives to conduct skills training and empower the poor. As a result, the poor in Payakumbuh Selatan Sub-district have received assistance for business capital. For the vulnerable, such as people with disabilities and the elderly, social protection and security assistance are provided, such as the National Health Insurance (JKN), the Family Hope Program (PKH), and rice groceries. There are several factors that hinder the running of the empowerment program, such as inadequate facilities and infrastructure, not yet mapping the potential and abilities of poor families who will be optimally empowered, and the personal mentality of the poor themselves.*

**Keywords: Empowerment; Policy; Poverty; Social Assistance; Welfare**

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi dan dampak pelaksanaan pemberdayaan masyarakat serta pengaruh pemberian bantuan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menemukan bahwa Perangkat Daerah telah memberikan bantuan berupa fasilitas pengembangan usaha ekonomi produktif bagi warga miskin ekstrem dan warga miskin yang ada di data Percepatan Pensasaran Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Selain itu, anggaran juga ditingkatkan melalui insentif fiskal untuk mengadakan pelatihan keterampilan dan memberdayakan masyarakat miskin. Hasilnya adalah masyarakat miskin di Kecamatan Payakumbuh Selatan sudah memperoleh bantuan untuk modal usaha. Bagi kaum renta seperti masyarakat dengan disabilitas dan lansia diberikan bantuan perlindungan dan jaminan sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), dan sembako beras. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat jalannya program pemberdayaan seperti sarana dan prasarana yang belum memadai, belum terpetakannya potensi dan kemampuan keluarga miskin yang akan diberdayakan secara optimal dan mental pribadi dari masyarakat miskin itu sendiri.

**Kata Kunci: Bantuan Sosial; Kebijakan; Kemiskinan; Kesejahteraan; Pemberdayaan**

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

## PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan salah satu negara berdaulat memiliki tujuan yang hendak dicapai tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Pembukaan UUD 1945). Poin penting dalam tujuan Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dimana negara bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada rakyatnya terutama dalam hal kesejahteraan.

Upaya penanganan fakir miskin merupakan salah satu amanat dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, kondisi pertumbuhan perekonomian Indonesia belum mencapai pada taraf yang memungkinkan bagi fakir miskin untuk mempunyai kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya secara mandiri. Untuk itu, diperlukan adanya pengaturan yang memberikan tanggung jawab pada pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penanganan fakir miskin sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara komprehensif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kesejahteraan bagi fakir Miskin. Peraturan Pemerintah ini juga untuk memenuhi amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial (Lumintang & Lesawengen, 2023). Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup bangsa. Pergeseran paradigma pembangunan saat ini masih terus dihadapkan pada aneka permasalahan yang menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya. Permasalahan sosial tersebut antara lain masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat (Umar et al. 2023). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya.

Kemiskinan pada hakekatnya adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, tetapi karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan antara lain ditandai dengan sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak bisa diubah, yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya produktivitas, ditambah lagi oleh terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendidikan dan terbatasnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Meidiana & Marhaeni, 2019). Oleh karena itu dalam pengentasan rakyat dan kemiskinan adalah terlebih dahulu menyadarkan mereka bahwa sesungguhnya tingkat kehidupan mereka itu sangat rendah, serta meyakinkan mereka bahwa sesungguhnya kondisi mereka itu masih bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kemiskinan harusnya dimulai dengan memberdayakan si miskin, yang dilaksanakan melalui suatu proses pendidikan yang berkelanjutan dengan prinsip menolong diri sendiri dan berlandaskan pada peningkatan kemampuan menghasilkan pendapatan, sehingga mereka mampu menjangkau terhadap fasilitas/kemudahan-kemudahan pembangunan yang tersedia dalam aspek sumber daya, permodalan, teknologi, dan pasar.

Menurut Sumodiningrat et al. (2005), "pemberdayaan" berasal dari kata "Memberi Daya" atau "Memberi Energi" dalam bahasa asing pemberdayaan disebut *empowerment*. Proses Pemberdayaan merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial (Pathony, 2019). Menurut Soemodiningrat et al. (2005), keberhasilan suatu pemberdayaan juga dapat diukur dengan berbagai indikator yang telah ditetapkan. Apabila seorang individu masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan/atau masih bergantung terhadap orang lain, maka hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang telah dilakukan belum dilaksanakan secara optimal atau bahkan gagal (Suharto, 2006).

Sebagaimana halnya dengan kebijakan nasional, penanggulangan kemiskinan juga menjadi prioritas pembangunan Kota Payakumbuh. Berbagai program sudah diluncurkan untuk pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data dari Bappeda Kota Payakumbuh bahwa jumlah KK Miskin Kecamatan Payakumbuh Selatan sebanyak 168 KK yang terdiri dari 813 Jiwa, atau 6,59% dari jumlah penduduk yang ada. Beberapa program dan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan sosial selama tahun 2023 disajikan pada tabel 1.

**Tabel 1.** Bantuan yang Diterima Masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2023

No.	Jenis Bantuan yang Diterima	KK	Jiwa
1.	PKH	85	85
2.	BPNT	92	94
3.	SEMBAKO	60	60
4.	BPUM	74	83
5.	BST	97	97
6.	PRA KERJA	21	24
7.	KUM	81	95

*Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh (2023)*

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita atau bagi ibu hamil).

Program Sembako merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) sebagai program transformasi bantuan pangan untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Seperti halnya program BPNT, program Sembako diharapkan dapat memberikan pilihan kepada penerima manfaat dalam memilih jenis, kualitas, harga dan tempat membeli bahan pangan. Untuk program Sembako, pemerintah meningkatkan nilai bantuan dan memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT, namun juga komoditas lainnya yang mengandung sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati maupun vitamin dan mineral sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.

Bantuan Sosial PBI JK adalah singkatan dari Bantuan Sosial Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Mengacu pada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Bansos PBI JK hanya diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan fakir miskin. Nantinya bantuan ini tidak diterima langsung oleh penerima, melainkan dibayarkan pemerintah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Selain itu, program bantuan sosial lainnya seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yaitu salah satu jenis BLT yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku UMKM. Pemerintah berharap masyarakat tetap mampu menjalankan bisnisnya dengan baik dan memiliki modal untuk melakukan promosi dengan harapan, perekonomian masyarakat Indonesia tidak terancam dan tetap bisa bertahan hidup di tengah susahny kondisi serta situasi saat ini. Program Banpres Produktif Usaha Mikro Program ini merupakan bantuan dari pemerintah kepada pekerja UMKM di seluruh

Indonesia. Setiap tahunnya, pelaku UMKM bisa menerima bantuan ini tak terkecuali bagi mereka yang telah menerimanya di tahun-tahun sebelumnya.

Program bantuan lainnya yaitu bantuan kesejahteraan Keluarga. Bantuan ini ini adalah untuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui kegiatan, bantuan usaha, pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Jumlah penerima bantuan ini untuk tahun 2024 adalah sebanyak 589 keluarga di Kecamatan Payakumbuh Selatan. Sedangkan untuk program pengembangan kompetensi kerja dan Kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja adalah Program Kartu Prakerja. Program ini adalah program pengembangan kompetensi kerja dan Kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini didesain sebagai sebuah produk dan dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Jalan digital melalui *marketplace* dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih dan memberi evaluasi. Hanya dengan cara ini, produk bisa terus diperbaiki, tumbuh dan relevan. Dengan menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat dengan semangat gotong royong demi SDM unggul, Indonesia maju.

Selain itu, pada tahun 2023 juga diberikan bantuan insentif fiskal. Insentif fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang, dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional. Data penerima insentif fiskal Kecamatan Payakumbuh Selatan disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.** Data Penerima Insentif Fiskal Kecamatan Payakumbuh Selatan

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Balai Panjang	9
2.	Kapalo Koto Ampangan	11
3.	Kototuo Limo Kampuang	8
4.	Limbukan	2
5.	Padang Karambia	10
6.	Sawah Padang Aua Kuniang	24
	Jumlah	64

*Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh (2024)*

Dari latar belakang kebijakan dalam pemberdayaan keluarga miskin melalui pemberian bantuan sosial dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial maka meneliti tertarik untuk

menganalisa dampak pemberian bantuan sosial ini bagi kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Apakah penerima yang keluar dari PKH disebabkan oleh tidak terdata di DTKS atau karena memang sudah mandiri atau masih masa transtisis, dan bagaimana bantuan pangan kesehatan dan bantuan sosial untuk perlindungan dan jaminan serta untuk pemberdayaan keluarga miskin ini bisa meningkatkan kesejahteraan. Dari beberapa perbincangan obeservasi awal dengan penerima dan pendamping serta beberapa pihak yang terlibat, dalam pemberian bantuan di Kecamatan Payakumbuh Selatan "bahwa ada beberapa dari penerima hanya tinggal menunggu setiap bantuan yang ada seperti sebuah penghasilan rutin yang memang harus diterima, dan terkadang peruntukan untuk bantuan yang seharusnya untuk pangan atau pendidikan digunakan untuk hal lain yang bersifat konsumtif".

Dalam penelitian ini digunakan indikator implementasi kebijakan menurut teori Sebatier dan Mazmanian (1980). Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan segala bentuk upaya untuk mendapatkan apa yang menjadi target dari tujuan itu sendiri. Menurut Mazmanian dan Sebatier, terdapat tiga faktor yang menentukan jalannya implementasi kebijakan yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan undang-undang, dan faktor lingkungan (Kharima & Nawangsari, 2024).

Oleh karena itu, penelitian tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Payakumbuh Selatan menjadi penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini dan untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mengatasi tantangan yang ada.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (Banks, 2018). Penelitian ini berfokus pada subjek tertentu dan mengkajinya sebagai studi kasus. Pendekatan studi kasus memberikan gambaran dan ilustrasi komprehensif tentang berbagai aspek individu, kelompok, organisasi, program atau situasi sosial (Rahardjo, 2017). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur. Wawancara merupakan komunikasi yang terjadi secara dua arah dimana peneliti akan menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan pedoman wawancara dan dilakukan dengan lebih leluasa dan tidak terlalu terikat dengan susunan pertanyaan pada pedoman wawancara (Pike, 2019). Wawancara dilakukan secara mendalam kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Subkooor Jaminan Sosial, Kepala Bidang Bappeda, Kepala Dinas Sosial, Camat Payakumbuh Selatan, dan Pendamping Program. Kemudian, terdapat tujuh keluarga miskin yang menjadi target dari implementasi program pemberdayaan keluarga miskin melalui bantuan sosial yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini. Skrip wawancara dikembangkan dengan merujuk

kepada teori implementasi kebijakan menurut Sebatier dan Mazmanian (1980) yang terdiri dari tiga faktor/indikator yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan undang-undang, dan faktor lingkungan. Analisis data menggunakan teknik triangulasi yakni terlebih dahulu mengumpulkan data (reduksi), dilanjutkan dengan menyajikan data (display), serta pada tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan (Rahardjo, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Bantuan Sosial di Kecamatan Payakumbuh Selatan: Perspektif Faktor Karakteristik Masalah**

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), faktor karakteristik dari masalah (tractability of the problems) diukur dengan menggunakan tiga indikator yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang ada, tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, serta presentase kelompok sasaran terhadap total populasi.

Hasil pernyataan tim pelaksana teknis pemberdayaan keluarga miskin melalui bantuan sosial di Kecamatan Payakumbuh Selatan menerangkan bahwa pelaksanaan program bantuan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Payakumbuh Selatan secara umum sudah baik. Beberapa komponen yang selalu dijadikan pedoman untuk verifikasi dan validasi oleh dinas terkait adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari dinas sosial dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan. Pernyataan informan terkait tingkat kesulitan teknis dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial di Kota Payakumbuh terutamanya di Kecamatan Payakumbuh Selatan relatif sama yaitu adanya permasalahan data. Hal ini diuraikan oleh Kadis Sosial dan Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping PKH seperti berikut ini.

*“Yang kita rasakan pertama bagaimana kita bisa mengakuratkan data karena data PPKS memang penting kita bersihkan dan akuratkan melalui proses verifikasi mendekati sempurna di lapangan, sepanjang data tidak bisa disempurnakan apalagi kita arena persolan, orang bansos mengatakan datanya salah atau tidak tepat sasaran sepanjang data tidak bisa disempurnakan apalagi kita melibatkan banyak pihak kawan-kawan di lapangan”* (Irwan Suwandi, Kadis Sosial).

*“Meskipun sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan pedoman dari Kementerian Sosial namun dalam perjalanan PKH di Kota Payakumbuh ditemukan beberapa kendala, seperti masih ada penerima manfaat PKH yang belum tepat sasaran akibat dari belum validnya DTKS yang digunakan sebagai sumber data penerima manfaat PKH”* (Pendamping PKH).

Dalam pengelolaan data sudah ada mekanisme dan peraturan tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), akan tetapi untuk pemberian bantuan tampaknya butuh pemetaan potensi secara sempurna. Dengan data potensi ini, nantinya bisa ditentukan program pemberdayaan yang akan diberikan kepada keluarga miskin.

Permasalahan yang dihadapi adalah DTKS ini belum sepenuhnya menasar keluarga yang kondisi perekonomiannya memang benar-benar dibawah garis kemiskinan. Hal ini diuraikan oleh Pendamping di Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang seperti berikut ini.

*“Orang yang tidak berhak merasa berhak, padahal tidak berhak dari kondisi nya yang kita lihat, menentukan orang yang mau mendapat, masyarakat ini jiwa ..... masih kurang, merasa tidak mampu, merasa layak mendapat bantuan padahal sebenarnya dibanding yang lain dia tidak layak”* (Maifanis, Pendamping di Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang).

Dalam menentukan penerima ini tentunya perlu diadakan pemetaan. Potensi yang ada bagi keluarga penerima manfaat ada bagi mereka yang sudah tidak mempunyai potensi yang ada tentunya akan diberikan bantuan untuk perlindungan dan jaminan sosial, sedangkan bagi keluarga miskin yang masih memiliki potensi akan diberikan bantuan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Disini penekanannya lebih kepada memberdayakan masyarakat miskin yang sekiranya memiliki kemampuan dan potensi untuk diberdayakan lebih lanjut. Masyarakat miskin yang memiliki kemampuan dan keahlian akan dibina lebih lanjut yang tentunya disesuaikan dengan potensi masing-masing. Ada yang berminat menjadi wirausaha atau hal lainnya seperti di bidang pertanian. Nantinya masyarakat yang berpotensi ini akan diberikan modal dan dibina lebih lanjut.

*“Kalau yang miskin itu yang menjadi prioritas itu yang pertama pemenuhan kebutuhan, sementara untuk yang masalah disabilitas itu, kalau mereka punya kemampuan untuk berusaha, maka akan dibantu usahanya, tapi sebenarnya harus dipisahkan antara yang memang hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan, karena tidak adanya kemampuan untuk melakukan usaha secara ekonomi dengan yang memang punya kemampuan untuk melakukan aktifitas ekonomi. Ada yang meskipun disabilitas ataupun lansia, tapi mereka punya kemampuan dan punya potensi, itu yang penting. Karena kemampuannya ada tapi potensinya tidak ada. Seharusnya pada kondisinya yang miskin dengan ada potensi pengembangan diri, disamping untuk pemenuhan kebutuhan, mereka juga harus dibantu ke pengembangan usaha. Jadi harapannya mereka bisa keluar dari status miskin”* (Subkor Jaminan Sosial Bidang PRJS).

*“Potensi bagi orang-orang yang punya sumberdaya tadi mereka bisa digerakkan atau diberdayakan ke bermacam-macam itu, ada yang mereka bisa misalnya, jualan atau pertanian atau yang lainnya dan kita nanti berikan bansos sesuai dengan apa potensi yang mereka miliki sehingga dengan itu kita berharap mereka berhasil dengan mengoptimalkan potensi sehingga mereka bisa keluar dari garis kemiskinan”* (Irwan Suwandi, Kadis Sosial).

Selain itu, penyaluran bantuan di Kecamatan Payakumbuh Selatan juga terbilang sukses yakni dengan berjalannya program seperti pemberian bantuan sosial (bansos). Keluarga miskin di Kecamatan Payakumbuh Selatan sudah memperoleh bantuan modal usaha. Keluarga miskin juga menerima bantuan lainnya berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Sembako beras, dan bantuan lainnya. PKH dimanfaatkan untuk membantu keluarga miskin yang memiliki anak yang sedang menempuh pendidikan. PKH dapat digunakan penerima untuk

membeli perlengkapan dan peralatan sekolah anak. Pemberian bantuan sosial ini ternyata memberikan hasil positif terhadap menurunnya angka kemiskinan ekstrem di Kota Payakumbuh termasuk di Kecamatan Payakumbuh Selatan sendiri.

*"Pemerintah Kota Payakumbuh komitmen dengan kesuksesan program kesejahteraan sosial ini, ditandai pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem kota Payakumbuh berada pada angka 0%, walaupun belum mempengaruhi secara signifikan kepada penurunan angka kemiskinan di Kota Payakumbuh"* (Kepala Bidang Bappeda).

Namun, dalam realisasi bantuan sosial masih saja ditemukan keterlambatan pencairan yang menjadikan penerima manfaat mengeluh terutama pada saat ajaran baru di satuan pendidikan dimulai.

*"Bantuan yang saya terima ada PKH yaitu untuk bantuan biaya sekolah anak sebanyak 3 orang. Lalu, ada bantuan usaha untuk membuat aksesoris kayak kawat, hanger, dll. Kemudian ada juga bantuan kesehatan"* (Hera, Penerima Manfaat).

*"Yang saya terima ada PKH Lansia dan bantuan beras serta uang 400 ribu"* (Nurjanis, Penerima Manfaat).

*"Ada seperti PKH, BPNT, dan kesehatan. Pada saat anak naik kelas kan banyak kebutuhan, sebelum anak mulai sekolah sebaiknya dicairkan PKH nya"* (Eri, Penerima Manfaat).

*"PKH Lansia setelah Covid, baru mendapat bantuan sembako"* (Dahyatul Isma, Penerima Manfaat).

*"Beras, jeruk, kacang hijau, minyak, sembako, sebulan ada 200 ribu"* (Sri Wantini, Penerima Manfaat).

Hal ini ternyata sejalan dengan data realisasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Bappeda bahwasanya jenis bantuan yang sudah direalisasikan adalah seperti JKN, PKH, Sembako, dan lain sebagainya.

*"Program kesejahteraan sosial sudah jelas dan konsisten dilakukan di Kota Payakumbuh termasuk Kecamatan Payakumbuh selatan. Pemerintah Daerah setiap tahun telah mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan sosial ini mulai dari anggaran Pendidikan dalam bentuk Program Indonesia Pintar, Program JKN, PKH, Sembako, Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan sebagainya. Apakah program tersebut tepat sasaran atau tidak dikembalikan ke PD terkait apakah penerima manfaat sudah sesuai dengan ketentuan"* (Kepala Bidang Bappeda).

Namun, dalam pelaksanaannya masih saja ditemui penerima manfaat yang tidak menggunakan bantuan tersebut kepada hal yang semestinya dipergunakan. Oleh karena itu, ini menjadi perhatian serius bagi tim pelaksana pemberdayaan keluarga miskin kedepannya. Selain dengan menimbang bahwa masih banyaknya penerima manfaat yang seakan keluar dari koridor sebutan "miskin" dan terkesan terlena dengan besaran bantuan yang diterimanya.

*"Ada yang menyalahgunakan bantuan misalnya ada untuk anak sekolah malah*

---

*dibelikan kepada kebutuhan yang lain” (Iyek, Tokoh Masyarakat).*

Untuk mengentaskan kemiskinan yang telah ada ini, di Kota Payakumbuh khususnya Kecamatan Payakumbuh Selatan lebih befokus pada peningkatan anggaran. Ini penting untuk mengadakan pelatihan keterampilan yang sifatnya lebih kepada memberdayakan masyarakat miskin tersebut sehingga nantinya mereka memiliki keterampilan khusus tertentu. Masyarakat miskin yang memiliki keterampilan akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Tidak hanya itu, masyarakat miskin juga sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Pengetahuan dan keterampilan adalah sangat krusial bagi seseorang dalam memenuhi penghidupan yang lebih layak kedepannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk tidak memanjakan ataupun memelihara kemiskinan yang ada tersebut. Terkadang fakta di lapangan menjadi bukti bahwa tak sedikit dari masyarakat miskin yang terkesan pemalas dan hanya mengharapkan bantuan sosial (bansos). Oleh karena itu, penambahan anggaran seperti APBN melalui insentif fiskal, CSR dan Baznas untuk mengadakan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat miskin oleh Kecamatan Payakumbuh Selatan adalah sangat tepat.

*“Untuk komitmen sejauh mana kepala daerah menyediakan dana untuk bantuan sosial terencana dalam APBD, dan juga kita mendapat insentif fiskal yang juga diarahkan pimpinan untuk mengatasi masalah masyarakat miskin” (Irwan Suwandi, Kadis Sosial).*

*“Alokasi anggaran untuk program kesejahteraan sosial setiap tahunnya dianggarkan melalui PD terkait, pada Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan PD lainnya yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Juga ada anggaran melalui ABPN dan melalui CSR dan Baznas” (Kepala Bidang Bappeda).*

### **Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Bantuan Sosial di Kecamatan Payakumbuh Selatan: Perspektif Faktor Karakteristik Kebijakan Undang-Undang**

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), faktor karakteristik kebijakan undang-undang (ability of statute to structure implementation) diukur menggunakan indikator yaitu kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, serta seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Hasil pernyataan dinas yang bertanggung jawab terhadap program bantuan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Payakumbuh Selatan menerangkan bahwa SOP kerja dan proses pendataan terkait implementasi kebijakan program bantuan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Payakumbuh Selatan secara umum sudah baik. Koordinasi diwadahi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD) yang dibebantugaskan dalam memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

*“Koordinasi antara lembaga dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial sudah cukup baik, Koordinasi ini di bawah melalui wadah TKPKD. Minimal setiap triwulan TKPKD melakukan rapat koordinasi terkait dengan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat khususnya masalah kemiskinan. Program kesejahteraan sosial tidak terlepas dari data DTKS yang ada. Karena penerima program kesejahteraan sosial adalah mereka yang sudah terdaftar di dalam DTKS”* (Kepala Bidang Bappeda).

Kecamatan Payakumbuh Selatan secara berjenjang berkoordinasi bersamaan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti dinas sosial dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi jalannya program. Karena jika salah satu aparat ataupun dinas terjadi yang namanya miskomunikasi maka dapat dipastikan program gerak ditempat. Namun, fakta di lapangan ditemukan bahwa peran pemangku kepentingan yang dalam hal ini pihak yang termasuk dalam Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum sepenuhnya optimal dalam mendorong percepatan kesejahteraan keluarga miskin seperti dengan memberikan peluang untuk bekerja. Oleh karena itu, program percepatan kesejahteraan sosial menjadi sulit untuk dilakukan.

*“Peran serta dari stakeholder kita belum begitu kuat, belum begitu banyak dunia usaha, PSKS belum optimal, kita bisa bersinergi dalam rangka menghimpun kekuatan mereka untuk turut serta menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial, membantu warga-warga kurang mampu, beberapa lembaga sudah bisa kita akses, kita bikin MOU tetapi partisipasi yang lebih masif ya dari masyarakat baik perorangan atau organisasi atau kelembagaan perlu juga kita kembali optimalkan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kota Payakumbuh. Untuk komitmen sejauh mana kepala daerah menyediakan dana untuk bantuan sosial terencana dalam APBD, dan juga kita mendapat insentif fiskal yang juga diarahkan pimpinan untuk mengatasi masalah masyarakat miskin”* (Irwan Suwandi, Kadis Sosial).

Masyarakat miskin mengungkapkan bahwasanya proses ataupun alur penerimaan bantuan terkait implementasi kebijakan program bantuan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Payakumbuh Selatan diawali atas usulan dari kelurahan. Kelurahan menjadi gerbang awal untuk masyarakat dapat terdata sebagai penerima bantuan. Tahap selanjutnya yakni mereka diminta untuk memenuhi berbagai persyaratan untuk pendataan lebih lanjut seperti melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

*“KTP, KK, melaporkan setiap bulan, berasnya difoto dan dikasih ke pendamping”* (Dahyatul Isma, Penerima Manfaat).

Tim pelaksana pemberdayaan keluarga miskin mengungkapkan bahwa mereka menginginkan adanya transparansi dalam hal penerima bantuan ini. Transparansi menjadi sangat krusial dikarenakan dapat memunculkan ketidakadilan nantinya. Pendataan terkait masyarakat miskin memang perlu diakuratkan lagi kedepannya karena masih ditemukan

penerima bantuan sosial yang secara ekonomi sudah baik. Disini terbukti bahwa kinerja dinas terutama dalam menerbitkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum maksimal. DTKS merupakan pedoman utama untuk menyalurkan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat.

*"Kesulitan secara teknis tidak ada. Hanya penentuan penerima karena di Kabupaten Kota kita bukan penentu siapa yang menerima atau tidak, adakalanya penerima itu pas dalam satu wilayah tertentu, contoh dalam satu kelurahan ada yang lebih membutuhkan tapi belum dia yang dapat itu kan menjadi masalah. Yang lain sebetulnya tidak ada masalah. Jadi tingkat prioritas nya, ada yang lebih membutuhkan dan sudah diusulkan tapi belum keluar karena penentuannya di Kementerian Sosial" (Pelaksana Teknis Bidang PRJS Dinas Sosial).*

*"Tantangan selama ini dalam implementasi program kesejahteraan sosial adalah data yang kurang valid yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan tidak signifikan dibandingkan dengan anggaran yang telah di alokasikan" (Kepala Bidang Bappeda).*

### **Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Bantuan Sosial di Kecamatan Payakumbuh Selatan: Perspektif Faktor Lingkungan**

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), faktor lingkungan non undang-undang (non statutory affecting implementation) diukur dengan menggunakan empat indikator yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilih (constituency groups), serta tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Hasil pernyataan dinas yang bertanggung jawab terhadap program bantuan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Payakumbuh Selatan menerangkan bahwa sikap dan penilaian terkait implementasi program bantuan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Payakumbuh Selatan secara umum sudah baik. Dinas terkait mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terkendalanya implementasi kebijakan program bantuan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Payakumbuh Selatan yaitu: belum maksimalnya pemetaan dan penentuan potensi, mental penerima manfaat, dan belum maksimalnya program pengembangan diri dan pelatihan.

*"Perilaku penerima manfaat program kesejahteraan sosial seperti yang kita lihat di lapangan sangat beragam, mulai dari masyarakat yang mampu sampai kepada masyarakat kurang mampu. Kembali lagi bagaimana mental dari masyarakat itu sendiri. Kebanyakan kita lihat banyak yang mau menjadi masyarakat miskin asalkan mendapatkan bantuan program kesejahteraan sosial" (Kepala Bidang Bappeda).*

*"Banyak juga masyarakat yang terlena dengan bantuan-bantuan yang ada sehingga memelihara kemiskinannya untuk sekedar mendapatkan bantuan. Kita tidak boleh menyerah, kita terus berusaha agar masyarakat dapat terberdayakan dan mandiri lagi" (Irwan Suwandi, Kadis Sosial).*

Faktor lainnya adalah seperti tidak adanya validasi Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS) sehingga menjadikan program yang telah disusun salah sasaran, dan program yang mangkrak. Ini merupakan kesalahan-kesalahan yang sifatnya mikro namun pengaruhnya terhadap jalannya program penanggulangan kemiskinan sangatlah besar. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan dasar utama yang menjadikan program dapat mensasar target penerima manfaat ataupun bantuan dengan tepat.

*“Tantangan selama ini dalam implementasi program kesejahteraan sosial adalah data yang kurang valid yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan tidak signifikan dibandingkan dengan anggaran yang telah di alokasikan”* (Kepala Bidang Bappeda).

Selain itu, faktor yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan adalah faktor dari diri masyarakat itu sendiri. Masyarakat miskin memiliki “mental miskin” yang sulit untuk dirubah. Masyarakat miskin hanya mengharapkan bantuan-bantuan sosial (bansos). Oleh karena itu, pada akhirnya mereka terkesan malas untuk berusaha mendatangkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan harian. Bantuan yang sudah diterima masyarakat miskin adalah seperti dana pendidikan untuk anak, sembako untuk memenuhi kebutuhan harian, dan juga bantuan kesehatan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat miskin sebenarnya juga tidak ingin hanya menerima uluran tangan dari pemerintah. Mereka menginginkan bantuan modal usaha. Masyarakat miskin sudah mengikuti pelatihan-pelatihan soft skills dari pemerintah. Namun, mereka megungkapkan bahwa pelatihan yang diikuti belum sepenuhnya dapat meningkatkan pendapatan karena pelatihan tersebut tidak pernah dievaluasi lebih lanjut. Ini menjadi renungan tersendiri bagi dinas terkait bahwasanya memang pemberdayaan masyarakat perlu ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa pelatihan yang diadakan memang berjalan sesuai yang diharapkan.

*“Ada. Saya ada dilatih keterampilan buat udang jahe dan keterampilan lain. Bagus sih biar kami ada penghasilan juga”* (Hera, Penerima Manfaat).

*“Pelatihan belum dan pendampingan juga belum”* (Eri, Penerima Manfaat).

## KESIMPULAN

Perangkat Daerah telah memberikan bantuan berupa fasilitas pengembangan usaha ekonomi produktif bagi warga miskin ekstrem dan warga miskin yang ada di data Percepatan Pensasaran Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Selain itu, anggaran juga ditingkatkan melalui insentif fiskal untuk mengadakan pelatihan keterampilan dan memberdayakan masyarakat miskin. Hasilnya adalah masyarakat miskin di Kecamatan Payakumbuh Selatan sudah memperoleh bantuan untuk modal usaha. Bagi kaum renta seperti masyarakat dengan disabilitas dan lansia diberikan bantuan perlindungan dan jaminan sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), dan sembako beras. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat jalannya

program pemberdayaan seperti sarana dan prasarana yang belum memadai, belum terpetakannya potensi dan kemampuan keluarga miskin yang akan diberdayakan secara optimal dan mental pribadi dari masyarakat miskin itu sendiri.

Untuk penelitian di masa mendatang, dapat menggunakan objek penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih besar. Selain itu, metode campuran (*mix method*) juga dapat digunakan agar hasil penelitian lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Banks, M. (2018). Using visual data in qualitative research. *Using visual data in qualitative research*, 1-192.
- Kharima, E., & Nawangsari, E. R. (2024). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Lansia Program PKH Plus di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(1), 136-146.
- Lumintang, J., & Lesawengen, L. (2023). Peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar "Senja Cerah". *Jurnal Ilmiah Society*, 3(2).
- Meidiana, N. P. C. A. T., & Marhaeni, A. A. I. N. (2019). Pengaruh kepemilikan aset, ketersediaan infrastruktur, dan pendidikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga miskin. *Buletin Studi Ekonomi*, 24(1).
- Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Pathony, T. (2019). Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang. *International Journal of Demos*, 1(2), 262-289.
- Pike, M. (2019). Interviews Instead of Self-Reports? Investigating Cues and Questions for the Detection of Honesty-Humility in Employment Interviews (Doctoral dissertation, University of Guelph).
- Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam penelitian kualitatif.
- Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya.
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy studies journal*, 8(4), 538-560.
- Suharto, E. (2009). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat.
- Sumodiningrat, Gunawan, Nugroho, N. (2005). *Membangun Indonesia Emas*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Umar, D. A., Arifin, J., & Aziz, F. (2023). Kemiskinan Masyarakat Urban Makassar. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 1(4), 12-25.